



GAMBARAN RUKUN MASYARAKAT ASLI YOGYAKARTA

Ayom Wahabi, Tabah Aris Nurjaman

Prodi Psikologi, Fakultas Bisnis & Humaniora,

Universitas Teknologi Yogyakarta, Indonesia

Abstrak

Penelitian bertujuan untuk mengkonstruksi bagaimana gambaran kerukunan yang dimaknai masyarakat asli Yogyakarta. Penelitian menggunakan pendekatan Psychology Indigenous dengan model pengembangan riset berbasis tema. Pengumpulan data dilakukan melalui dua tahap yaitu melalui kuesioner terbuka (primer) dan wawancara (sekunder). Responden penelitian merupakan masyarakat asli Yogyakarta yang lahir dan tinggal di Yogyakarta. Sebanyak 111 responden mengisi kuesioner terbuka. Wawancara dilakukan kepada dua responden dengan karakteristik yang sama. Data dianalisis menggunakan pendekatan analisis isi dengan kerangka kerja grounded theory meliputi open coding, axial coding dan selective coding. Hasil penelitian menunjukkan kerukunan dimaknai sebagai situasi tanpa pertengkaran dan perselisihan yang dilandasi oleh perilaku peduli (rewang), berkumpul (srawung) dan menghargai (ngajeni). Kerukunan terbagi menjadi dua kategori berdasarkan motivasinya. Pertama, memandang kerukunan sebagai tujuan yang dilatarbelakangi oleh kesadaran sosial sehingga membentuk sifat rukun dalam, yaitu kerukunan yang tulus dan dimaknai sebagai tujuan akhir. Kedua, memandang kerukunan sebagai alat yang dilatarbelakangi oleh faktor relasional sehingga membentuk sifat rukun dangkal, yaitu kerukunan yang dimaknai sebagai alat untuk mencapai tujuan lain.

Kata Kunci: indigenous psychology, kerukunan, masyarakat Yogyakarta.

PENDAHULUAN

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) disebutkan oleh Suseno (2003) sebagai wilayah dengan basis kebudayaan Jawa yang kuat. Hal tersebut tidak membuat Daerah Istimewa Yogyakarta menutup diri pada kehadiran masyarakat dengan latarbelakang budaya yang berbeda. Daerah Istimewa Yogyakarta terus didatangi oleh beragam masyarakat dari aneka ragam kebudayaan, adat istiadat, tata cara dan tata krama pergaulannya masing-masing. Data yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil Daerah Istimewa Yogyakarta menunjukkan bahwa pada 2018 terdapat 11.923 pendatang yang kemudian bertempat tinggal di Daerah Istimewa Yogyakarta (Hidayah, 2019). Kondisi tersebut akhirnya membuat Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi wilayah yang majemuk.

Dalam beberapa peristiwa, kemajemukan justru menjadi latarbelakang beberapa peristiwa konflik di Indonesia. Misalnya konflik yang terjadi di Poso pada 1998-2007 antara kelompok kampung Kristen dan Islam yang bermula dari perkelahian anggota warga dari kedua kelompok pada 24 Desember 1998, yang juga merupakan akumulasi dari kekecewaan masyarakat terhadap suksesi politik lokal, kesenjangan perekonomian antara penduduk “asli” dan “pendatang”, nilai-nilai kebudayaan lokal yang kurang dihargai, hingga penegakan hukum yang dinilai diskriminatif (Tara’u, 2016). Konflik juga terjadi di Kalimantan Tengah pada Februari 2001 yang merupakan realitas pertentangan antara penduduk “asli” dan “pendatang”, sebagai akibat dari beberapa peristiwa sebelumnya yang dihadapi dengan penyelesaian semu, hingga membuat masyarakat “pendatang” harus merekonstruksi adaptasi perilakunya terhadap penduduk “asli” (Taufik, 2004).

Daerah Istimewa Yogyakarta dengan latarbelakang kemajemukannya juga tidak terlepas dari peristiwa intoleranisme. *Setara Institute* pada 2014-2019 melakukan survei tentang provinsi intoleran di Indonesia yang menunjukkan Daerah Istimewa Yogyakarta berada di posisi kelima paling intoleran. *The Wahid Institute* pada 2014 juga melakukan survei serupa yang hasilnya menunjukkan Daerah Istimewa Yogyakarta berada di posisi kedua paling intoleran. Dari 154 kasus intoleransi serta pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan yang dicatat *Wahid Foundation* sepanjang tahun 2014, 21 peristiwa di antaranya terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada 2015 peringkat Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai provinsi intoleran turun ke posisi empat. Dari 190 kasus intoleransi, 10 diantaranya terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta (Kusuma, 2016).

Beberapa peristiwa intoleranisme yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta diantaranya adalah penolakan terhadap seorang pendatang yang akan bertempat tinggal di Dusun Karet, Desa Pleret, Kabupaten Bantul, karena memiliki latar belakang keyakinan yang berbeda. Hal tersebut juga telah diatur melalui Surat Keputusan dengan Nomor D3/POKGIAT/Krt/Plt/X/ 2015 dimana mengatur bahwa siapapun yang akan tinggal di wilayah Dusun Karet, Desa Pleret, Kabupaten Bantul, diharuskan menganut agama Islam (Khalika, 2019). Peristiwa intoleranisme lainnya terjadi pada 2018 ketika warga memotong salib salah satu makam di kotagede karena makam tersebut berada di tengah pemakaman masyarakat Islam. Selanjutnya ada peristiwa penolakan calon camat di Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul, kerena warga merasa daerah mereka didominasi oleh masyarakat Islam sehingga mereka menolak untuk memiliki camat dengan keyakinan selain Islam (Khalika, 2019).

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta sendiri menyampaikan instruksi melalui surat No. K.898/I/A/1975 tentang Penyeragaman *Policy* Pemberian Hak Atas Tanah kepada warga negara Indonesia *non*-pribumi. Instruksi tersebut mengatur bahwa warga *non*-pribumi dilarang memiliki hak atas tanah di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, yang dinilai sebagai kebijakan diskriminatif oleh kelompok warga *non*-pribumi di Daerah Istimewa Yogyakarta (Stephanus, 2018). Survei yang menunjukkan bahwa Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi provinsi dengan tingkat intoleranisme tinggi menunjukkan bahwa terdapat pola relasi sosial yang tidak terjalin dengan baik di tengah suasana kemajemukan masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta.

Di luar serangkaian temuan tentang peristiwa intoleranisme yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam penelitian lainnya ternyata diketahui bahwa masyarakat asli Daerah Istimewa Yogyakarta juga memiliki sikap yang positif terhadap kehadiran kelompok masyarakat dari latar belakang budaya yang berbeda. Beberapa temuan di antaranya adalah bagaimana sebenarnya persepsi yang dibangun masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap partisipasi sosial etnis Tionghoa. Hasilnya diketahui bahwa persepsi yang dibangun tidak dipengaruhi oleh pengetahuan tentang kebudayaan Tionghoa dan status sosial ekonomi mereka, melainkan lebih dipengaruhi oleh pola interaksi sosial serta partisipasi sosial yang ditunjukkan saat itu (Harianto, 2007).

Dalam penelitian lainnya, diketahui pola interaksi masyarakat pribumi kampung Ketandan dan etnis Tionghoa yang cenderung memilih cara kekeluargaan dalam menyikapi permasalahan yang terjadi, karena dilatar belakangi oleh hubungan yang sudah terjalin sejak ratusan tahun antar

kedua kelompok. Masyarakat pribumi dan etnis Tionghoa yang menempati wilayah kampung Ketandan saling berbagi rasa percaya dan mengutamakan toleransi dalam mengatasi perbedaan yang ada untuk mengurangi *stereotype* yang muncul antar keduanya (Perdana, 2018). Temuan tersebut bertolak belakang dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan provinsi dengan tingkat intoleranisme tinggi. Hal tersebut memunculkan pertanyaan bagaimana sebenarnya masyarakat asli Daerah Istimewa Yogyakarta memaknai secara mendalam konsep berelasi sosial untuk menciptakan situasi yang rukun.

Pertanyaan tersebut akan terjawab dengan dilakukannya sebuah penelitian yang mengeksplorasi bagaimana konsep rukun yang dimaknai oleh masyarakat asli Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal tersebut penting karena pada tataran praktiknya upaya untuk menciptakan kerukunan pada setiap wilayah akan berbeda dan bervariasi karena dipengaruhi oleh dinamika kultural pada masing-masing wilayah (Suseno, 2003). Berlaku rukun diperlukan supaya relasi yang telah terjalin dapat dipertahankan dengan baik karena pada dasarnya setiap individu memiliki motivasi kuat dan mendasar untuk membentuk dan mempertahankan relasi sosial (Baumeisterr, 2012). Rukun bagi masyarakat Jawa merupakan salah satu kaidah yang menentukan pola pergaulan masyarakat yang menjelaskan bahwa di setiap situasi manusia harus bersikap sedemikian rupa untuk menghindari konflik dan perpecahan. Kaidah ini merupakan kerangka normatif yang menentukan bentuk konkret pola interaksi masyarakat (Suseno, 2003).

Lestari dan kawan-kawan (2013) melakukan penelitian yang mengkonseptualisasi rukun yang ada pada konteks masyarakat Jawa. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa

rukun yang dimaknai oleh masyarakat Jawa adalah suasana terjaganya keselarasan antara satu pihak dengan pihak lain dalam kebersamaan, yang disertai dengan kepedulian terhadap kondisi yang dialami pihak lain yang mengacu pada individu atau kelompok. Dengan demikian konflik dapat terjadi antar individu dengan kelompok maupun kelompok dengan kelompok. Lestari dan kawan-kawan (2013) menjelaskan kerukunan dalam hubungan sosial sebagai fenomena kompleks dalam psikologi sosial yang melibatkan interaksi antara nilai sosial, orang, dan masyarakat. Tara'u (2016) melakukan penelitian yang menjelaskan konsep kerukunan yang ada pada konteks masyarakat Poso pasca konflik, yang diartikan sebagai suatu hubungan yang terjalin dengan baik karena terjaga dan terpeliharanya hubungan melalui sikap dan perilaku untuk mengatasi konflik, serta menunjukkan kebersamaan dan kepedulian terhadap orang lain.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi rukun berdasarkan pandangan masyarakat asli Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal tersebut penting diketahui karena beberapa penelitian terdahulu menunjukkan temuan yang saling bertolak belakang. Maka perlu diketahui bagaimana sebenarnya konsep, dimensi, dan dinamika kerukunan yang diyakini oleh masyarakat asli Daerah Istimewa Yogyakarta.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk ke dalam tema penelitian Psikologi Indigenous dengan pendekatan pengembangan riset berbasis tema, yaitu eksplorasi unsur-unsur kontekstual di Indonesia, baik yang bersifat kultural ataupun religius seperti ajaran agama, sistem adat, terminologi daerah, dan simbol-simbol kebudayaan (Faturachman *et al.*, 2017). Metode penelitian yang dipakai adalah kualitatif melalui pendekatan *grounded*

theory karena berfokus pada upaya pembuktian ilmiah menggunakan seperangkat prosedur sistematis untuk mengembangkan teori dari dasar yang diperoleh secara induktif tentang suatu fenomena.

Sebanyak 111 partisipan telah mengisi instrumen kuesioner terbuka dengan kriteria partisipan lahir dan bertempat tinggal di Daerah Istimewa Yogyakarta, meliputi wilayah Sleman, Gunungkidul, Bantul, Kulonprogo, dan Kota Yogyakarta. Terdapat 51,4% responden perempuan dan 48,6% responden laki-laki. Sementara representasi dari setiap daerah meliputi 47,73% warga Sleman, 19,81% warga Kota Yogyakarta, 5,39% warga Gunungkidul, 17,17% warga Bantul, dan 9,90% warga Kulonprogo. Selanjutnya terdapat dua responden yaitu S (38) dan H (40) sebagai responden dalam pengumpulan data melalui wawancara.

Data eksplorasi diperoleh menggunakan lima pertanyaan terbuka: ¹*Bagaimana anda memaknai kerukunan?* ²*Apa saja perilaku yang anda anggap sebagai bentuk kerukunan?* ³*Apa saja hal yang mempengaruhi kerukunan anda?* ⁴*Apa saja hambatan yang menghalangi terwujudnya kerukunan?* ⁵*Menurut pengalaman anda, apa saja akibat yang timbul jika tidak terjadi kerukunan?* Analisis data dilakukan dengan mengikuti kerangka kerja *grounded theory* melalui proses *content analysis* dengan melewati lima tahap yaitu mendefinisikan unit yang akan di analisis, menentukan definisi kategori, uji coba kategorisasi, kategorisasi pada seluruh teks, dan evaluasi akurasi dan reliabilitas dari hasil kategorisasi. Selanjutnya, data ditabulasi melalui pendekatan *multiple response* yang melalui tiga tahap yaitu *open coding*, *axial coding*, dan *selective coding* kepada masing-masing aitem.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses analisis isi dilakukan terhadap jawaban responden dari kelima pertanyaan terbuka. Pada tahap *axial coding* ditemukan 39 subtema yang terbagi kedalam 5 tema pertanyaan dengan rincian 9 subtema untuk makna rukun, 10 subtema untuk perilaku rukun, 9 subtema untuk motif perilaku, 11 subtema untuk hambatan rukun, dan 7 subtema untuk dampak ketidakrukunan.

Berdasarkan makna rukun, *adem ayem* (46%) memiliki persentase tertinggi sebagai subtema menurut responden, yang bermakna tidak ada perselisihan antar warga atas kesadaran bersama bahwa penting untuk menjaga suasana tanpa konflik dengan tidak mudah memperlakukan masalah sekecil apapun. Selanjutnya, dari lima subtema yang muncul tentang perilaku rukun, peneliti merumuskannya ke dalam tiga kategori. Pertama, *rewang*, bermakna semangat warga untuk mengabdikan diri demi kepentingan orang banyak. Terdapat simpati dan empati (29,8%) individu untuk mengambil peran, meskipun kecil, untuk berkontribusi demi kepentingan orang banyak. Kedua, *srawung*, bermakna upaya warga untuk menjaga keterhubungan (26,1%) satu sama lain, yang berawal dari kesadaran bahwa setiap anggota saling terhubung dalam satu kelompok tanpa sekat yang memisahkan. *Srawung* penting sebagai upaya mengenali satu sama lain yang mendorong rasa pengertian dan menghargai (*Ngajeni*) untuk mengurangi potensi konflik. Ketiga, *ngajeni*, bermakna upaya warga untuk menghargai dan menghormati (21,4%) kepentingan dan hak satu sama lain, yang ditujukan sebagai upaya memandang manusia lainnya sebagai manusia seutuhnya dengan segala karakteristik kelebihan dan kekurangannya.

Berdasarkan motifnya, peneliti merumuskan perilaku kerukunan terbagi di dalam dua kategori. Pertama,

rukun dalam, yang dilatar belakangi oleh keyakinan (33,6%) individu tanpa melihat kepada siapa dan apa dampak balik bagi dirinya. Individu melihat perilaku kerukunan sebagai hal yang penting untuk hadir dalam masyarakat dan memposisikannya sebagai tujuan akhir. Kedua, *rukun dangkal*, yang dilatar belakangi faktor relasional meliputi persepsi (27,5%), kedekatan (23,7%), dan konformitas (15,3%) yang membuat perilaku kerukunan lebih digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan lain selain rukun itu sendiri. Jika kerukunan sebagai alat tidak mencapai tujuannya, maka akan memicu terwujudnya perilaku yang menghambat kerukunan.

Kondisi yang menghambat terwujudnya kerukunan menurut responden adalah intoleranisme (45,2%), hal tersebut mengindikasikan bahwa responden mengetahui bahwa intoleranisme merupakan hal yang semestinya dihindari apabila ingin mencapai kerukunan. Selanjutnya, dampak apabila kerukunan tidak tercapai menurut responden adalah ketidakselarasan (46,3%), yang bermakna sebuah situasi perpecahan hubungan sosial di mana timbul perselisihan serta potensi perselisihan yang lebih besar secara horizontal maupun vertikal. Hal tersebut terjadi karena individu lebih mementingkan kepentingan pribadi dan kelompoknya sehingga kepentingan yang lebih besar tidak bisa terpenuhi.

Berdasarkan temuan penelitian ini (Gambar 1), konsep rukun yang dimaknai masyarakat asli Daerah Istimewa Yogyakarta adalah kondisi tidak ditemukannya perselisihan antar anggota masyarakat yang dilandasi terwujudnya perilaku untuk saling memperhatikan dan merawat satu sama lain (*Rewang*), tidak adanya sekat pemisah yang menghalangi hubungan sosial sehingga setiap individu dapat saling terhubung satu sama lain (*Srawung*), dan kemampuan dari setiap

anggota masyarakat untuk saling menghargai dan menghormati (*Ngajeni*).

Konsep rukun dalam penelitian ini memiliki persamaan dengan konsep rukun masyarakat Jawa menurut penelitian Lestari *et al.* (2013), yaitu suasana terjaganya keselarasan antar pihak dalam kebersamaan yang disertai kepedulian pada kondisi pihak lain. Konsep rukun pada penelitian ini juga memiliki persamaan dengan konsep rukun masyarakat Poso menurut penelitian Tara'u (2016), yaitu hubungan yang terjalin baik karena terjaga dan terpeliharanya hubungan melalui sikap dan perilaku mengatasi konflik serta menunjukkan kebersamaan dan kepedulian pada orang lain, sehingga situasi yang damai baik secara interpersonal maupun secara sosial tercapai. Letak persamaan konsep rukun pada penelitian ini dengan dua penelitian tersebut terletak pada rasa peduli yang melatarbelakangi kerukunan.

Penjelasan tersebut juga sesuai dengan penuturan Greetz (1983), seperti dikutip Suseno (2003), yang menjelaskan rukun merupakan kaidah yang menentukan pola pergaulan masyarakat Jawa, yang menjelaskan bahwa dalam setiap situasi manusia harus mengatur sikapnya sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan konflik atau perpecahan. Geertz (1983) selanjutnya menjelaskan kerukunan sebagai *harmonious social appereance*, yaitu penampilan yang harmonis, artinya meskipun terjadi perselisihan, yang terpenting adalah membuat perselisihan tersebut tidak tampak di permukaan.

Konsep *harmonious social appereance* mirip dengan kategori *rukun dangkal*, dimana kerukunan yang terwujud merupakan manifestasi keinginan menggunakan kerukunan sebagai alat mencapai tujuan lain selain rukun itu sendiri, namun berbeda dengan kategori *rukun dalam*, yang bermakna kerukunan sebagai manifestasi kesadaran individu untuk

memaknai kerukunan sebagai tujuan akhir. Kategori *rukun dalam* di penelitian ini memiliki kemiripan dengan *Essential Harmony* (kerukunan esensial) menurut Lestari *et al.* (2013) yang bermakna terwujudnya perilaku rukun yang didasarkan pada empati, ketulusan, dan kemauan membangun hubungan yang baik. *Rukun dalam* juga memiliki persamaan dengan *rukun substantif* menurut Tara'u (2016), yaitu upaya mencapai keterhubungan dengan orang lain karena menghargai hubungan tersebut dan demi menjaga tali persaudaraan.

Kategori *rukun dangkal* memiliki kemiripan dengan *Pseudo Harmony* (kerukunan semu) menurut Lestari *et al.* (2013), yaitu perilaku menjaga hubungan yang harmonis dengan orang lain dengan menutupi konflik yang belum selesai, hal tersebut biasanya terjadi ketika individu ingin memiliki kehidupan sosial yang terlihat baik dengan memilih untuk menekan perasaan negatif dan mempertahankan harmoni meskipun tidak tulus. *Rukun dangkal* juga memiliki kemiripan dengan *rukun dangkal* menurut Tara'u (2016), yaitu perilaku menjaga keharmonisan yang dilakukan demi kepentingan pribadi terutama untuk menghindari penilaian negatif dari orang lain dan memenuhi tuntutan lingkungannya dengan harapan dapat menjalani kehidupannya dengan tenang tanpa ada yang mengganggu.

Selanjutnya, dimensi *Rewang* didukung konsep *sepi ing pamrih* dan *rame ing gawe* menurut Suwardi (2013), di mana *sepi ing pamrih* bermakna jiwa orang Jawa yang bekerja untuk keluarga, bekerja untuk masyarakat, bekerja untuk kemanusiaan atau untuk kesejahteraan dunia tanpa mengharapkan imbalan. *Sepi ing pamrih* terwujud sebagai hasil dari penerapan *rame ing gawe* yang bermakna strategi untuk mengolah *pamrih*. Masyarakat Jawa meyakini kehidupan akan berjalan baik jika

individu mampu mengontrol *pamrih*-nya. Dimensi *Srawung* didukung uraian Niels (1978), yang menjelaskan bahwa manusia sebagai satu individu dalam pandangan Jawa tidaklah penting. Sebaliknya, dengan kebersamaan terbentuklah keselarasan masyarakat yang akan bermanfaat bagi setiap individu di dalamnya. Tugas moral setiap individu adalah menjaga keselarasan tersebut dengan menjalankan kewajiban sosial dengan individu lainnya. Dimensi *Ngajeni* didukung konsep *tepa seliro* dan *rumangsa* menurut Suwardi (2013), di mana *tepa selira* bermakna kemampuan mengukur diri sendiri hingga mau menghargai dan menghormati pihak lain. Sementara *rumangsa* bermakna kemampuan merasakan apa yang dirasakan pihak lain, jika diri kita merasakan sakit ketika disakiti, maka hendaknya manusia tidak menyakiti pihak lain.

SIMPULAN

Berdasarkan interpretasi atas hasil penelitian, konsep rukun yang dimaknai oleh masyarakat asli Daerah Istimewa Yogyakarta adalah kondisi tidak ditemukannya perselisihan antar anggota masyarakat yang dilandasi terwujudnya perilaku kerukunan, meliputi kemampuan individu untuk memperhatikan dan merawat satu sama lain (*rewang*), tidak adanya sekat yang menghalangi hubungan antar individu sehingga tercipta keterhubungan (*srawung*), kemampuan individu untuk menekan ego sehingga tercipta suasana saling menghargai dan menghormati (*ngajeni*), yang berdasarkan motifnya terbagi kedalam dua kategori yaitu kesadaran sosial yang menjadikan kerukunan sebagai tujuan akhir sehingga membentuk sifat *rukun dalam*, dan faktor relasional yang menjadikan kerukunan sebagai alat sehingga membentuk sifat *rukun dangkal*. Dalam sifat *rukun dangkal*, ketika individu tidak memperoleh nilai yang diinginkan dari

pemakaian rukun sebagai alat, hal tersebut bisa mendorong munculnya perilaku yang menghambat kerukunan itu sendiri, meliputi intoleranisme, apatisme dan identifikasi terhadap status sosial. Hal tersebut mendorong terciptanya suasana ketidakselarasan, dis-integrasi dan *insecurity*.

Penelitian ini merupakan penelitian psikologi indigenous dengan model pengembangan riset berbasis tema, yaitu eksplorasi unsur kontekstual di Indonesia, baik yang bersifat kultural ataupun religius seperti ajaran agama, sistem adat, terminologi daerah, dan simbol kebudayaan yang digunakan untuk mengkonseptualisasikan tema kontekstual di Indonesia yang belum teridentifikasi secara ilmiah. Untuk itu, penelitian selanjutnya dapat mengembangkan model riset sintesis psikologi indigenous *mainstream*-lokal, yaitu komparasi konsep atau teori Barat-Amerika atau Asia dengan konsep teori lokal Indonesia. Hal tersebut berguna untuk mengidentifikasi temuan ilmiah lokal Indonesia yang tidak sejalan atau tidak dapat dijelaskan oleh konsep atau teori di luar konteks Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Aditjondro, G. J. (2004). Kerusakan Poso dan Morowali, akar permasalahan dan jalan keluarnya. Makalah dipresentasikan pada pertemuan bertema: "Penerapan Keadaan Darurat di Aceh, Papua dan Poso Dalam Pemilu 2004" oleh ProPatria, Hotel Santika, Jakarta.

Azwar, S. 2017. *Metode Penelitian Psikologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar .
Darmawan, Deni. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung. PT Remaja.

Baumeister, R. F. (2012). Need-to-belong theory. Dalam P. A. M. Van Lange, A. W. Kruqlanski, & E. T. Hiqqins (Eds.), *Handbook of theoris of social psychology volume 2* (hal. 21-140). London: Sage Publications.

Cheung, C., & Ma, S. K. (2011). Coupling social solidarity and social harmony in Hong

Kong. *Social Indicators Research*, 103, 145-167.
doi: 10.1007/s11205-010-9702-8

Faturochman., Minza, W. M., & Nurjaman, T. A., (2017) *Memahami dan mengembangkan Indigenous Psychology*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Geertz, H. (1983). *Keluarga Jawa*. Jakarta: Grafiti Pers

Hariato, H. 2007. *Persepsi masyarakat terhadap partisipasi sosial etnis Tionghoa di Yogyakarta*. (Skripsi tidak terpublikasi). Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Hidayah, Kurniatul. 2019. Tercatat 11.923 Penduduk Baru di Kota Yogya Selama 2018. Diakses pada 03 September 2020. Sumber: <https://jogja.tribunnews.com/2019/01/25/tercatat-11923-penduduk-baru-di-kota-yogya-selama-2018?page=2>

Khalika, Nindias. 2019. Kasus Slamet dan Kejadian Intoleransi di Yogyakarta. Diakses pada tanggal 03 September 2020. Sumber: <https://jogja.idntimes.com/news/jogja/nindias-khalika/kasus-slamet-dan-kejadian-intoleransi-di-yogyakarta/5>

Kim, U., Yang, K. S., & Hwang, K. K. (2010). *Indigenous and cultural psychology: Memahami orang dalam konteksnya* (H. Prajitno & S. Mulyantini, Trans.). Yogyakarta: Pustaka Pelajar. (Naskah asli diterbitkan tahun 2006).

Kusuma, A. 2016. Yogyakarta, kota yang makin tak toleran. CNN Indonesia. Diakses pada tanggal 25 April 2020. Sumber: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160808211440-20-150068/yogyakarta-kota-yang-makin-tak-toleran>

Lestari, S., Walgito, B., Faturochman., & Adiyanti, M. G. (2013). The concept of harmony in javanese society. *Anima, Indonesian Psychological Journal*, 29(1), 24-37.

Suseno, F. M. (2003). *Etika Jawa: Sebuah analisis falsafi tentang kebijaksanaan hidup Jawa*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Niels, M (1977). *Kepribadian Jawa dan pembangunan nasional*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Perdana, A. F. (2018) *Interaksi Sosial Etnis Tionghoa dengan Masyarakat Lokal dalam Wacana Pluralisme di Yogyakarta*. (Skripsi tidak

terpublikasi). Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Stephanus, N. P. 2016. *Produksi dan Kontestasi Ruang Sosial Yogyakarta (Kajian produksi ruang dan kontestasi sosial dalam Asrama Barisan Mahasiswa Kaimana di Yogyakarta)*. (Skripsi tidak terpublikasi). Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Savitri, S. I. (2008) Membangun budaya damai berkesinambungan: Pendekatan teori identitas sosial, etnosentrisme, dan psikologi komunitas di Poso, Sulawesi Tengah. *Jurnal Psikologi Indonesia*, 1, 22-30.

Sugiyono (2019) *Metode penelitian pendidikan (Kuantitatif, kualitatif, kombinasi, R&D dan penelitian pendidikan)*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono (2016) *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suwardi, Endraswara (2013) *Memayu Hayuning Bawana: Laku menuju keselamatan dan kebahagiaan orang Jawa*. Yogyakarta: Narasi.

Tara'u, D. P. N. (2016). *Konsep Rukun Masyarakat Poso* (Tesis tidak terpublikasi). Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Taufik. 2004. *Strategi adaptasi migran Banjar di kota Palangkaraya: Pasca konflik Dayak-Madura Kalimantan Tengah*. (Tesis tidak terpublikasi). Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.